



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

RANKHIR RENCANA KERJA

2027



+62 811-2934-644



dukcapilonline.wonosobokab.go.id



[@disdukcapilwonosobo](https://www.instagram.com/disdukcapilwonosobo)



Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2027**

Disusun berdasarkan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran tahunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, serta memperhatikan ketentuan umum tata cara perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ini merupakan hasil penyempurnaan atas rancangan awal dan rancangan Renja Perangkat Daerah setelah memperhatikan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, serta penelarasa akhir terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, serta dasar penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2027 guna mendukung pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Wonosobo, 24 Juli 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo



DWI SARASWATI, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197704131997032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 6

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 6

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 15

2.3 Inovasi Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15

2.4 Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 21

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 21

3.2 Arah Kebijakan..... 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 25

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027..... 25

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 31

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 31

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 33

BAB VI PENUTUP 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD.....2

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 11

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / Renja Perangkat Daerah 17

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 20

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 22

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 24

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028.....28

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 32

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo wajib menyusun dokumen perencanaan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 84 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

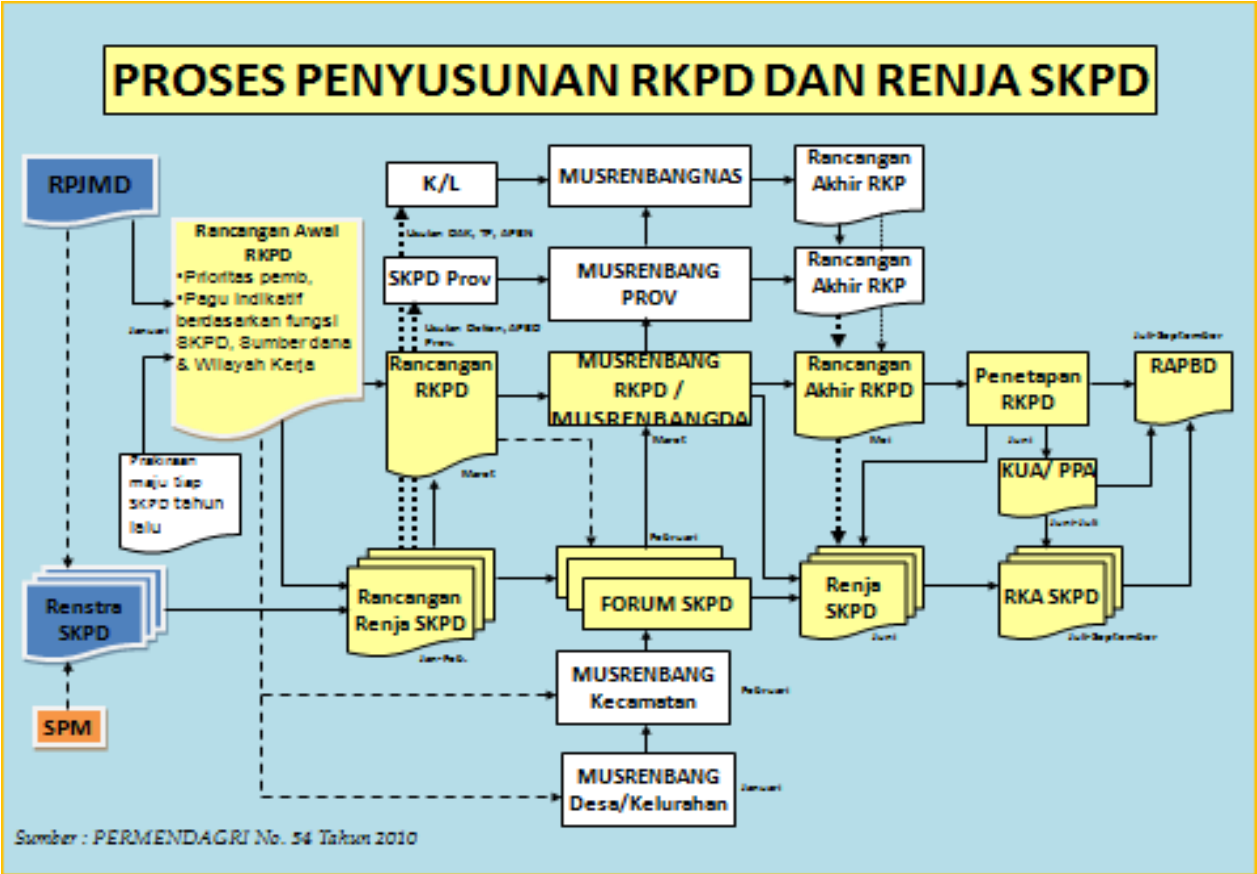
- a. Merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 yang bertema “Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan” untuk mencapai visi “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur”.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas yang berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD
- c. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
- e. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas
- f. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
- d. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja

- e. Penetapan Rencana Kerja
- Proses penyusunan RKPD dan Renja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD



1.2 Dasar Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah (10-2015/2024));
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah : (3-15/2024);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 1);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023: (Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021), dan diubah kembali dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024: (Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini dimaksudkan agar Program dan Kegiatan Tahun 2027 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2045, serta sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 serta Rancangan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo. Renja merupakan penjabaran dari rencana strategis untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan untuk menentukan arah kebijakan pada urusan administrasi kependudukan

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) Tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah dilakukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKANAAN

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan
- 2.2. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
- 2.3. Inovasi Bidang Urusan
- 2.4. Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- Bab ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2027
- 4.1 Rencana Program, kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027
 - 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Khusus

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Bab ini memuat tentang indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci tahun 2027
- 5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027
 - 5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagai capaian tahun pertama Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dan capaian triwulan II tahun 2026 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025. Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pelayanan Adminduk Capil

Indeks Pelayanan Adminduk Capil merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan kepada masyarakat. Angka Indeks Pelayanan Adminduk Capil diperoleh dari nilai score dimensi layanan, pemanfaatan data kependudukan dan implementasi IKD dengan variabel perhitungan cakupan akta kelahiran, cakupan akta kematian, cakupan akta perkawinan, cakupan akta perceraian, cakupan kepemilikan KIA, cakupan perekaman KTP, peningkatan PKS daerah dalam satu tahun, dan persentase pemanfaatan IKD terhadap penduduk wajib KTP-el. Pada tahun 2025 target indeks pelayanan adminduk capil adalah 73.35 namun realisasi yang tercapai sebesar 67.15. Hal ini disebabkan oleh persentase pemanfaatan IKD dan cakupan kepemilikan akta perkawinan belum memenuhi target.

Target persentase pemanfaatan IKD sebesar 7.07% sedangkan hasil yang dicapai sebesar 5,6%. Belum tercapainya target pemanfaatan IKD dikarenakan kurangnya sosialisasi yang masif dan pemanfaatan IKD yang belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sehingga masyarakat belum merasa memerlukan IKD. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target pemanfaatan IKD terhadap penduduk wajib KTP-el adalah dengan melakukan jemput bola ke sekolah dan ke desa /kelurahan.

Target cakupan akta perkawinan sebesar 62% sedangkan hasil yang dicapai sebesar 57.07%. Belum tercapainya target cakupan akta perkawinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terkait update data kependudukan dalam hal ini status perkawinan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target adalah dengan mengadakan jemput bola ke desa untuk pemutakhiran data dan melakukan kerjasama dengan KUA atau Pemuka agama yang memberika surat keterangan menikah untuk melakukan pendaftaran pernikahan sekaligus updating data perkawinan bagi calon pengantin.

b. Indeks Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indeks Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan bagian dari indeks pelayanan adminduk capil yang secara spesifik mengukur kualitas pelayanan terkait pendaftaran penduduk, seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), pembuatan KTP elektronik, pembuatan Kartu Identitas Anak, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital, dan surat keterangan kependudukan lainnya. Angka indeks pelayanan pendaftaran penduduk diperoleh dari rerata persentase wajib KTP-el yang sudah perekaman KTP-el, persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari, dan persentase penduduk rentan yang sudah terlayani kepengurusan data kependudukannya.

Indeks pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 sudah mencapai target yaitu sebesar 67.79% dari target yang direncanakan 63.45%. Tercapainya target indeks pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 didukung dengan kegiatan jemput bola KIA pada sekolah dasar dan sekolah menengah dan kegiatan jemput bola perekaman atau pendataan penduduk rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan.

c. Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil

Indeks pelayanan pencatatan sipil merupakan dari indeks pelayanan adminduk capil yang secara spesifik mengukur kualitas pelayanan terkait pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, seperti pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim, pencatatan perceraian bagi penduduk non muslim, dan pencatatan peristiwa penting lainnya. Angka indeks pelayanan pencatatan sipil diperoleh dari rerata persentase penerbitan akta kematian, persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-4 tahun, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian.

Indeks pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 sudah mencapai target yaitu sebesar 83.42% dari target yang direncanakan 71.76%. Tercapainya target indeks pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2025 didukung dengan kegiatan jemput bola akta kelahiran yang dilakukan di desa/kelurahan dan kerjasama dengan puskesmas, bidan, dan instansi kesehatan lain terkait penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.

d. Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan

Indeks pemanfaatan data dan pengelolaan data kependudukan merupakan ukuran komposit yang menilai kemampuan dan kinerja dalam mengelola, mengamankan dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Angka indeks pemanfaatan data dan pengelolaan data kependudukan diperoleh dari rerata persentase perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD dan persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah.

Pada tahun 2025 Indeks Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Data Kependudukan telah mencapai target dengan angka realisasi 39.29 dari target yang direncanakan 32. Hal ini didukung dengan peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang

sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD dan tanggapan OPD terhadap pengolahan dan penyajian data kependudukan yang ditujukan bagi perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja berdasarkan capaian IKK Tahun 2025 dapat dilihat melalui program:

a. Program Pendaftaran Penduduk

- 1) Persentase penduduk wajib KTP-el yang sudah perekaman KTP-el
 Pada tahun 2025 target indikator persentase penduduk wajib KTP-el yang sudah perekaman KTP-el adalah sebesar 99.21% dan terealisasi 98.55%. Belum tercapainya persentase penduduk wajib KTP-el yang sudah perekaman KTP-el disebabkan oleh mobilitas penduduk dan pertumbuhan penduduk yang dinamis. Upaya peningkatan persentase penduduk wajib KTP-el yang sudah perekaman KTP-el yang sudah dilakukan antara lain melakukan jemput bola perekaman KTP ke sekolah menengah atas dan wilayah desa / kelurahan di Kabupaten Wonosobo.
- 2) Persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP
 Pada tahun 2025 target indikator Persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP adalah sebesar 7.07% dan terealisasi 5.6%. Belum tercapainya persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP disebabkan IKD belum bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat pengguna IKD. Upaya peningkatan persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP yang sudah dilakukan antara lain melakukan jemput bola ke sekolah menengah atas dan wilayah desa / kelurahan di Kabupaten Wonosobo terkait aktivasi IKD.
- 3) Persentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari
 Pada tahun 2025 target indikator persentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari adalah sebesar 65% dan terealisasi 70.77%. Tercapainya persentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari didukung dengan kegiatan jemput bola ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki target siswa usia 0-17 tahun kurang 1 hari.
- 4) Persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan
 Pada tahun 2025 target indikator persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan adalah sebesar 82.52% dan terealisasi 96.25%. Tercapainya persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan didukung dengan kegiatan jemput bola pada penduduk rentan dan kerjasama dengan pihak desa untuk pendataan penerima bantuan dan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan.

b. Program Pencatatan Sipil

- 1) Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun
 Pada tahun 2025 target indikator persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun adalah sebesar 98.04% dan terealisasi 99.98%. Tercapainya persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun didukung dengan

terlaksananya kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit ibu dan anak dalam proses pendataan dan pembuatan dokumen kependudukan untuk anak baru lahir.

2) Persentase penerbitan akta kematian

Pada tahun 2025 target indikator persentase penerbitan akta kematian adalah sebesar 65% dan terealisasi 100%. Tercapainya persentase penerbitan akta kematian didukung dengan terlaksananya kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rumah sakit dan pihak desa dalam proses pendataan dan pembuatan dokumen akta kematian bagi penduduk yang sudah meninggal dunia.

3) Persentase kepemilikan akta perkawinan

Pada tahun 2025 target indikator persentase kepemilikan akta perkawinan adalah sebesar 62% dan terealisasi 57%. Belum tercapainya persentase kepemilikan akta perkawinan disebabkan oleh dokumen perkawinan yang berbeda dengan dokumen kependudukan yang dimiliki dan menjadikan proses pemutakhiran data terhambat. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target persentase kepemilikan akta perkawinan adalah dengan melakukan pemutakhiran data secara rutin, bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama terkait perbedaan dokumen perkawinan dan dokumen kependudukan, dan bekerjasama dengan pemuka agama yang membantu proses perkawinan bagi penduduk non muslim.

4) Persentase kepemilikan akta perceraian

Pada tahun 2025 target indikator persentase kepemilikan akta perkawinan adalah sebesar 62% dan terealisasi 76.62%. Tercapainya persentase kepemilikan akta perceraian didukung oleh kebutuhan masyarakat perubahan status perkawinan menjadi cerai hidup atau cerai mati untuk keperluan layanan publik lain.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1) Persentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakann denggan lembaga atau OPD

Pada tahun 2025 jumlah lembaga atau perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertambah 17 (tujuh belas) lembaga atau perangkat daerah dengan total menjadi 31 (tiga puluh satu) dokumen perjanjian kerjasama. Penambahan 17 (tujuh belas) lembaga atau perangkat daerah terbagi dalam 16 (enam belas) perjanjian kerjasama pelayanan dan 1 (satu) dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan data.

2) Persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah

Pada tahun 2025 dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan telah disebarkan ke 25 OPD dan lembaga yang memanfaatkan data kependudukan sebagai pemenuhan kebutuhan perencanaan makro dan sektoral

Secara rinci rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo s.d Tahun 2026 tersaji pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota: Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP	100 %	99.20 %	99.21 %	98.55 %	99.33	99,30%	99.54	100.24
						Persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah Perekaman KTP	N/A	N/A	7.07 %	5.6 %	7.9	9,89%	6.59	66.63
						Persentase kepemilikan KIA usia 0-17 th kurang 1 hari	53,07 %	61.87 %	65 %	70.77 %	108.88	70,50%	75.08	106.50
						Persentase Penduduk rentan yang sudah terlayani kepengurusan dokumen kependudukan	75 %	82.52 %	82,52 %	96.25 %	116.64	83%	90.12	108.58
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk	500	500	500	500	100	500 orang	500 orang	500 orang
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun	N/A	N/A	98.04 %	99.98 %	101.98	98,50%	99.98	101.50
						Persentase penerbitan akta kematian	53.19 %	100 %	65 %	100 %	153.85	65,50%	64.43	98.37
						Persentase kepemilikan akta perkawinan	N/A	N/A	62 %	57.07 %	92.05	63%	59.03	93.70
						Persentase kepemilikan akta perceraian	N/A	N/A	62 %	76.62 %	123.58	63%	77.42	122.89
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	500	500	500	500	500	500 orang	500 orang	500 orang

2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 layanan	4 layanan	4 layanan
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 laporan	1 laporan	1 laporan
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD	15 %	75 %	14 %	28.57 %	204	18,75%	0	0
						Persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah	N/A	N/A	50 %	50 %	100	55,50%	0	0
2	12	04	2.01		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah ketersediaan data agregat untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral	28 data	28 data	28 data	28 data	100	100 data agregat	100 data agregat	100 data agregat
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait pemanfaatan data kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan
2	12	01			Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100			

						Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100			
						Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 %	90 %	90 %	90 %	100			
						Persentase keterisian data statis sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100			
						Nilai hasil Pengawasan Kearsipan	92.86	92.86	92.86	92.86	100			
						Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100			
2	12	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	1 paket
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Akntor Yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	1 paket
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakn Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn Dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	1 paket
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	1 paket

2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Yang Diperoleh Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Perkantoran Penunjang Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik Yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	10 unit
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Mushola, Laktasi, Pengaduan, Gudang) (Masuk Gudang)	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mengidentifikasi isu penting yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi. Isu penting yang perlu ditindak lanjuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menunjang pelayanan secara daring
2. Mobilitas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
3. Integrasi data kependudukan dengan pelayanan publik lainnya
4. Meningkatkan pemahaman penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan
5. Potensi inovasi yang semakin memudahkan pelayanan untuk masyarakat

Berdasarkan isu penting tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain dalam:

1. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan yang memadai
3. Peningkatan kualitas data kependudukan
4. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan
5. Perlunya kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pemanfaatan langsung dokumen kependudukan di pelayanan publik lainnya
6. Mengintensifkan pelayanan administrasi kependudukan di desa
7. Pelayanan berbasis teknologi informasi rentan terhadap serangan siber

2.3 Inovasi Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah membuat inovasi pelayanan yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pelayanan keliling/jemput bola KIA ke SD/MI dan SMP/MTS
 - b. Pelayanan keliling/jemput bola pendataan dan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan
 - c. Pelayanan keliling/jemput bola aktivasi IKD di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo
 - d. Pelayanan keliling/jemput bola aktivasi IKD dan perekaman KTP-el di SMA/MA
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Pelayanan keliling/jemput bola Akta Kematian ke desa-desa se-Kabupaten Wonosobo
 - b. Sosialisasi layanan pencatatan sipil
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan melalui layanan online
 - b. Pemutakhiran data kependudukan
4. Sekretariat

- a. Penyediaan jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas
- b. Penyediaan ruang khusus laktasi
- c. Penyediaan urai roda bagi penyandang disabilitas

Inovasi layanan administrasi kependudukan terintegrasi pada aplikasi berbasis website yaitu PANDAWA SAKTI dan aplikasi IKD. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap keabsahan dokumen yang diajukan. Adanya inovasi layanan ini diharapkan proses pemutakhiran data kependudukan semakin cepat dan valid, serta masyarakat semakin cepat dalam menerima dokumen kependudukan yang diperlukan. Layanan berbasis teknologi informasi ini memiliki kelemahan dalam sistem keamanan data sehingga pemeliharaan sistem keamanan data dilakukan secara rutin dan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain itu, inovasi pemanfaatan data dengan memanfaatkan dokumen kependudukan, seperti KIA, di lokasi wisata/tempat rekreasi.

2.4 Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan hasil penyempurnaan terhadap Rancangan Awal Renja yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Penyempurnaan dilakukan melalui proses review terhadap kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya kebijakan efisiensi dan *refocusing* anggaran, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan penyelenggaraan urusan kepegawaian.

Proses review ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir Renja tetap selaras dengan arah kebijakan pembanguna daerah, prioritas pembangunan, serta kapasitas fiskal daerah. Hasil review menunjukkan bahwa secara umum substansi Rancangan Awal Renja tetap dipertahankan, sedangkan penyempurnaan dilakukan pada beberapa program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan alokasi pendanaan sebagai tindak lanjut penyesuaian kebijakan penganggaran. Perubahan ini mengakibatkan adanya penyesuaian pagu dari pagu indikatif menjadi pagu definitif, tanpa mengurangi pencapaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / Renja Perangkat Daerah
(Tabel khusus perbandingan rancangan awal dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun : 2027

No	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (pagu Indikatif)					Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah					Selisih Pagu Anggaran	Keterangan (Berkurang / Bertambah / Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Wonosobo	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	7.410.787.891	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Wonosobo	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	7.718.208.425	307.420.534	Bertambah
		Kab Wonosobo	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Kab Wonosobo	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
		Kab Wonosobo	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	91%			Kab Wonosobo	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	91%			
		Kab Wonosobo	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	100%			Kab Wonosobo	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	100%			
		Kab Wonosobo	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	93.5 %			Kab Wonosobo	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	93.5 %			
		Kab Wonosobo	Persentase Keselarasan Progra Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	100%			Kab Wonosobo	Persentase Keselarasan Progra Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	100%			
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	6.000.000	6.000.000	Bertambah
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Terbayarkan Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	14 Kali /Orang / Bulan	5.117.045.595	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Terbayarkan Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	14 Kali /Orang / Bulan	4.935.240.189	181.805.406	Berkurang
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	Berkurang
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	519.997.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	310.700.000	209.297.500	Berkurang
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Wonosobo	Persentase BMD Yang Diperoleh Sesuai Kebutuhan	100%	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Wonosobo	Persentase BMD Yang Diperoleh Sesuai Kebutuhan	100%	1.132.525.775	832.525.775	Bertambah
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Wonosobo	Cakupan Pelayanan Perkantoran Penunjang Kinerja	100%	898.744.796	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Wonosobo	Cakupan Pelayanan Perkantoran Penunjang Kinerja	100%	1.023.742.461	124.997.665	Bertambah

g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Wonosobo	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	425.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Wonosobo	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	235.000.000	190.000.000	Berkurang
2	Program Pendaftaran Penduduk	Kab Wonosobo	Persentase Penduduk Wajib KTP-EI Yang Sudah Perekaman KTP-EI	99,40%	860.000.000	Program Pendaftaran Penduduk	Kab Wonosobo	Persentase Penduduk Wajib KTP-EI Yang Sudah Perekaman KTP-EI	99,40%	861.050.000	1.050.000	Bertambah
		Kab Wonosobo	Persentase Penduduk Yang Sudah Aktivasi IKD Bagi Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Perekaman KTP	11,72%			Kab Wonosobo	Persentase Penduduk Yang Sudah Aktivasi IKD Bagi Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Perekaman KTP	11,72%			
		Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari	75,30%			Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari	75,30%			
		Kab Wonosobo	Persentase Penduduk Rentan Yang Terlayani Kepengurusan Dokumen Kependudukan	83,50%			Kab Wonosobo	Persentase Penduduk Rentan Yang Terlayani Kepengurusan Dokumen Kependudukan	83,50%			
a	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab Wonosobo	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	500	860.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab Wonosobo	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	500	861.050.000	1.050.000	Bertambah
3	Program Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-4 Tahun	98,60%	300.000.000	Program Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-4 Tahun	98,60%	126.000.930	173.999.070	Berkurang
		Kab Wonosobo	Persentase Penerbitan Akta Kematian	66%			Kab Wonosobo	Persentase Penerbitan Akta Kematian	66%			
		Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	64%			Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	64%			
		Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	64%			Kab Wonosobo	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	64%			
a	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	500	200.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	500	66.100.930	133.899.070	Berkurang
b	Penyelenggaraan Pencatatan Sipi	Kab Wonosobo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Paket	100.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipi	Kab Wonosobo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Paket	60.000.000	40.000.000	Berkurang
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Wonosobo	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerjasama Dan/Atau Pemanfaatan Data Yang Sudah Dilaksanakan Dengan Lembaga Atau Opd	21,05%	140.000.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Wonosobo	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerjasama Dan/Atau Pemanfaatan Data Yang Sudah Dilaksanakan Dengan Lembaga Atau Opd	21,05%	100.695.000	39.305.000	Berkurang
		Kab Wonosobo	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah	60,50%			Kab Wonosobo	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah	60,50%			
a	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Kab Wonosobo	Jumlah Ketersediaan Data Agregat Untuk Kebutuhan Perencanaan Makro Dan Sektoral	28 Data	100.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Kab Wonosobo	Jumlah Ketersediaan Data Agregat Untuk Kebutuhan Perencanaan Makro Dan Sektoral	28 Data	65.125.000	34.875.000	Berkurang

b	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Wonosobo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Wonosobo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	35.570.000	4.430.000	Berkurang
					8.710.787.891					8.805.954.355	95.166.464	Bertambah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Usulan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Masyarakat bisa menyampaikan usulan dengan mengisi kuesioner pada Survey Kepuasan Masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo kurang representatif, ruang tunggu dan tempat parkir kurang luas.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Wonosobo	Gedung kantor pelayanan yang representatif	1 unit	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu-isu tersebut kemudian dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai dengan Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 1 tahun kedepan yaitu “Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien” dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil
- 3. Meningkatnya Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan

Selama periode perencanaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai hasil optimal, yang terinci sebagai berikut :

Tujuan	: Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien
Indikator Kinerja	: Indeks Pelayanan Adminduk Capil
Sasaran 1	: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja	: Indeks Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sasaran 2	: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja	: Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil
Sasaran 3	: Meningkatkan Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan
Indikator Kinerja	: Indeks Pemanfaatan Dan Pengelolaan Data Kependudukan

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (Tahun n-1)	Target Tahun Rencana (n)	Target Tahun (n+1)	Target Tahun (n+2)	Kondisi Akhir (Akhir Renstra)
1	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Adminduk Capil	75.13	76.21	77.02	78.07	79.25
		Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran penduduk	Indeks pelayanan pendaftaran penduduk	66.39	68.44	70.50	71.99	73.73
		Meningkatnya kinerja pelayanan pencatatan sipil	Indeks pelayanan pencatatan sipil	72.5	73.15	73.8	74.45	75.13
		Meningkatnya kinerja pemanfaatan data kependudukan	Indeks pemanfaatan dan pengelolaan data kependudukan	37.13	40.78	43.62	47.75	52.04

3.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus melaksanakan strategi serta kebijakan, maka ditetapkan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 yang difokuskan pada “Perluasan implementasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan layanan adminduk
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
3. Peningkatan literasi digital bagi SDM aparatur dan masyarakat
4. Penguatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Provinsi/Kabupaten/Kota: Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VISI : MEWUJUDKAN WONOSOBO SEJAHTERA, ADIL, DAN MAKMUR
MISI : Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran penduduk 2. Meningkatnya kinerja pelayanan pencatatan sipil 3. Meningkatnya kinerja pemanfaatan data kependudukan	1. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan adminduk 2. Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi 3. Peningkatan sistem keamanan data 4. Pemantapan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan adminduk 2. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk 3. Pengembangan sistem keamanan data pada sistem layanan (<i>security system</i>) 4. Peningkatan pemutakhiran data kependudukan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027

Kerangka pendanaan memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan belas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pemerintahan pilihan dan lima unsur pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan non urusan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan indikator kinerja persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KPI), persentase keterisian data statis sektoral, Nilai hasil pengawasan kearsipan, dan persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam mencapai target indikator kinerja pada tahun 2027, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp7.718.208.425 yang bersumber dari PAD sebesar Rp6.718.208.425 dan mendapatkan anggaran yang bersumber dari pajak rokok sebesar Rp1.000.000.000 diperuntukan khusus untuk alat perekaman mobile yang akan dibagikan ke kecamatan dan pengadaan server pendukung layanan online. Program ini dilaksanakan dengan 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
- b. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 2) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 6) Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Dan Listrik
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
- Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan indikator kinerja persentase penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman KTP-el, persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak usia 0-17 tahun kurang satu hari, dan persentase penduduk rentan yang sudah terlayani kepengurusan data kependudukan. Dalam mencapai target indikator kinerja pada tahun 2027 Program Pendaftaran Penduduk merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp861.050.000 dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu:
- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
- Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan indikator kinerja persentase penerbitan akta kematian, persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-4 tahun, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian. Dalam mencapai target indikator kinerja pada tahun

2027 Program Pencatatan Sipil merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp126.100.930 dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan sipil
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Sub kegiatan Sosialisasi terkait pencatatan sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan indikator kinerja persentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD dan persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah. Dalam mencapai target indikator kinerja pada tahun 2027 Program Pencatatan Sipil merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp100.695.000 dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Sub kegiatan Pengumpulan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 2) Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - 3) Sub kegiatan Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1						2	4	5	6	7	8	10	11	
2						Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2	12					Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				8.805.954.355	PAD		8.805.954.355	
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab Wonosobo	100 %	7.718.208.425	PAD	100 %	7.718.208.425	
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Wonosobo	100 %			100 %		
							Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Kab Wonosobo	91 %			91.5 %		
							Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	Kab Wonosobo	100 %			100 %		
							Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Kab Wonosobo	93.5 %			94 %		
							Persentase Keselarasan Progra Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kab Wonosobo	100 %			100 %		
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	8 dokumen	6.000.000	PAD	8 Dokumen	6.000.000	
2	12	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	3 Dokumen	3.000.000	PAD	3 Dokumen	3.000.000	
2	12	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusnnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Wonosobo	5 Laporan	3.000.000	PAD	5 Laporan	3.000.000	
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarkan Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Kab Wonosobo	14 Kali /Orang / Bulan	4.935.240.189	PAD	14 Kali /Orang /Bulan	4.935.240.189	
2	12	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab Wonosobo	14 Kali /Orang /Bulan	4.935.240.189	PAD	14 Kali/Oran g/Bulan	4.935.240.189	
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	1 Dokumen	75.000.000	PAD	1 Dokumen	75.000.000	
2	12	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Wonosobo	100 Orang	75.000.000	PAD	100 Orang	75.000.000	
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Umum Perangkat daerah yang terlaksana	Kab Wonosobo	1 paket	310.700.000	PAD	1 paket	310.700.000	
2	12	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paker Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Paket	4.000.000	PAD	1 Paket	4.000.000	
2	12	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Akntor Yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Paket	100.000.000	PAD	1 Paket	100.000.000	

2	12	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Paket	15.000.000	PAD	1 Paket	15.000.000	
2	12	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Dokumen	4.000.000	PAD	1 Dokumen	4.000.000	
2	12	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Wonosobo	4 Laporan	185.700.000	PAD	4 Laporan	185.700.000	
2	12	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Wonosobo	12 Laporan	2.000.000	PAD	12 Laporan	2.000.000	
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan	Kab Wonosobo	1 Unit	1.132.525.775	PAD	1 Unit	1.132.525.775	
2	12	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Unit	1.067.525.775	PAD, Pajak Rokok	1 Unit	1.067.525.775	
2	12	01	2	07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Unit	15.000.000	PAD	1 Unit	15.000.000	
2	12	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Wonosobo	1 Unit	50.000.000	PAD	1 Unit	50.000.000	
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab Wonosobo	1 Unit	1.023.742.461	PAD	1 Unit	1.023.742.461	
2	12	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Wonosobo	2 Laporan	5.000.000	PAD	2 Laporan	5.000.000	
2	12	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	Kab Wonosobo	12 Laporan	150.000.000	PAD	12 Laporan	150.000.000	
2	12	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kab Wonosobo	12 Laporan	868.742.461	PAD	12 Laporan	868.742.461	
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab Wonosobo	1 Unit	235.000.000	PAD	1 Unit	235.000.000	
2	12	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Wonosobo	1 Unit	125.000.000	PAD	1 Unit	125.000.000	
2	12	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Wonosobo	1 Unit	25.000.000	PAD	1 Unit	25.000.000	
2	12	01	2	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kab Wonosobo	1 Unit	10.000.000	PAD	1 Unit	10.000.000	
2	12	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Wonosobo	1 Unit	75.000.000	PAD	1 Unit	75.000.000	
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Wajib KTP-EI Yang Sudah Perekaman KTP-EI	Kab Wonosobo	99,40%	861.050.000	PAD	99,50%	861.050.000	
							Persentase Penduduk Yang Sudah Aktivasi IKD Bagi Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Perekaman KTP	Kab Wonosobo	11,72%			15,57%		
							Persentase Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari	Kab Wonosobo	75,30%			80,20%		
							Persentase Penduduk Rentan Yang Terlayani Kepengurusan Dokumen Kependudukan	Kab Wonosobo	83,50%			84%		

2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab Wonosobo	500	861.050.000	PAD	500	861.050.000	
2	12	02	2	01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab Wonosobo	4 Dokumen	861.050.000	PAD	4 Dokumen	861.050.000	
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-4 Tahun	Kab Wonosobo	98,60%	126.000.930	PAD	98,70%	126.000.930	
							Persentase Penerbitan Akta Kematian	Kab Wonosobo	66%			66,50%		
							Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Kab Wonosobo	64%			65		
							Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	Kab Wonosobo	64%			65		
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	500	66.100.930	PAD	500	66.100.930	
2	12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan, Dan Peneribtan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, Dan Peneribtan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Wonosobo	1 Dokumen	31.225.930	PAD	1 Dokumen	31.225.930	
2	12	03	2	01	0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	Kab Wonosobo	4 Layanan	34.875.000	PAD	4 Layanan	34.875.000	
2	12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	1 Paket	60.000.000	PAD	1 Paket	60.000.000	
2	12	03	2	02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab Wonosobo	1 Dokumen	60.000.000	PAD	1 Dokumen	60.000.000	
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerjasama Dan/Atau Pemanfaatan Data Yang Sudah Dilaksanakan Dengan Lembaga Atau Opd	Kab Wonosobo	21,05%	100.695.000	PAD	21,73%	100.695.000	
							Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Perangkat Daerah	Kab Wonosobo	60,50%			65,50%		
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Ketersediaan Data Agregat Untuk Kebutuhan Perencanaan Makro Dan Sektoral	Kab Wonosobo	28 Data	65.125.000	PAD	28 Data	65.125.000	
2	12	04	2	01	0001	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah Dan Disajikan	Kab Wonosobo	2 Dokumen	35.000.000	PAD	2 Dokumen	35.000.000	
2	12	04	2	01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab Wonosobo	4 Dokumen	20.000.000	PAD	4 Dokumen	20.000.000	
2	12	04	2	01	0003	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab Wonosobo	15 Laporan	10.125.000	PAD	15 Laporan	10.125.000	
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Wonosobo	1 Laporan	35.570.000	PAD	1 Laporan	35.570.000	
2	12	04	2	03	0003	Fasilitasi Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Wonosobo	15 Laporan	35.570.000	PAD	15 Laporan	35.570.000	

**BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo ini disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target Renstra (Tahun Berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Adminduk Capil	Angka	76,21	89.4	76,21	Disdukcapil
2	Indeks Pelayanan pendaftaran Penduduk	Angka	68.44	68.25	68.44	Disdukcapil
3	Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil	Angka	73.15	83.58	73.15	Disdukcapil
4	Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Angka	40.78	60.71	40.78	Disdukcapil

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci digunakan untuk menilai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Indikator Kinerja Kunci terdiri dari indikator program, indeks kepuasan masyarakat, nilai SAKIP, dan indikator pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027

Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah/Kabupaten Wonosobo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target Renstra (Tahun Berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
1	Persentase penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP	%	99,4	98.93	99,4	Pusdat Disdukcapil
2	Persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman	%	11,72	5.6	11,72	Pusdat Disdukcapil
3	Persentase kepemilikan KIA usia 0-17 th kurang 1 hari	%	75,3	71.80	75,3	Pusdat Disdukcapil
4	Persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan	%	83,5	96.69	83,5	Pusdat Disdukcapil
5	Persentase penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0 - 4 tahun	%	98,6	99.98	98,6	Pusdat Disdukcapil
6	Persentase penerbitan akta kematian	%	66	100	66	Pusdat Disdukcapil
7	Persentase kepemilikan akta perkawinan	%	64	57.67	64	Pusdat Disdukcapil
8	Persentase kepemilikan akta perceraian	%	64	76.67	64	Pusdat Disdukcapil

9	Persentase Jumlah Perjanjian Kerjasama Dan/ Atau Pemanfaatan Data Yang Sudah Dilaksanakan Dengan Lembaga Atau OPD	%	21,05	121.43	21,05	Disdukcapil
10	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Perangkat Daerah	%	60,50	N / A	60,50	Disdukcapil
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,6	93.17	87,6	Aplikasi Layanan Bagor
12	Nilai Sakip	Angka	68,2	72.32	68,2	Tim SAKIP

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini merupakan pelaksanaan tahun ke 3 dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025 – 2029, disusun dengan memperhatikan dan menelaah kebijakan nasional dan isu yang berkembang tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029. Dengan disusunnya RENJA ini diharapkan kedepan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 ini disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya RENJA ini maka:

1. RENJA ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027;
3. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat.

Wonosobo, 24 Juli 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo



DWI SARASWATI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197704131997032002